JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Vol.5 Nomor 2, Maret 2025
E-ISSN: 2723-7001
https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

HAMBATAN SOSIAL DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI WILAYAH 5T: STUDI KASUS IMEKKO, SORONG SELATAN

Juniyanti Tuarita[1], Abdulatip Banda[2], Nensy Lusida[3]
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Werisar
Email:
junutuarita@gmail.com[1], bandaunsar@gmail.com[2], nensylusidaparlin@gmail.com[3]

Received : 08-06-2025	*Revised* : 09-07-2025	*Accepted* : 09-07-2025

This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak: Transformasi layanan administrasi kependudukan menuju sistem digital menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. IKD dirancang untuk menggantikan KTP fisik dan memberikan kemudahan akses identitas secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah tertinggal seperti IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan sekitarnya) di Kabupaten Sorong Selatan, implementasi IKD menghadapi berbagai hambatan sosial dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparatur Dukcapil, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan sosial mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah. Sementara itu, hambatan teknis meliputi keterbatasan jaringan internet, infrastruktur digital yang minim, serta kurangnya perangkat dan kompetensi teknis pada aparatur pelaksana. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan adaptif berbasis lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai solusi implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah 5T.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital; IMEKKO; literasi digital; infrastruktur; pelayanan publik

Abstrack: *The transformation of population administration services into digital systems has become a priority within Indonesia's bureaucratic reform agenda. One of the key initiatives in this effort is the implementation of the Digital Population Identity (IKD) by the Ministry of Home Affairs. IKD is designed to replace physical ID cards and provide citizens with easy access to their identity through digital platforms. However, in underdeveloped regions such as IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, and surrounding areas) in South Sorong Regency, the implementation of IKD encounters numerous social and technical challenges. This study aims to identify and analyze these barriers through a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques including field observations, in-depth interviews with residents and civil registry officials, and document analysis. The findings reveal that social barriers include low digital literacy, limited public understanding of digital systems, and inadequate government outreach. Technical obstacles consist of limited internet access, poor digital infrastructure, and a lack of devices and technical skills among implementing officials. These results highlight the need for adaptive, locally grounded strategies, enhanced human resource capacity, and accelerated development of digital infrastructure. The study serves as a reference for formulating inclusive policies that address the needs of communities in Indonesia's most disadvantaged regions.*

Keywords: Digital Population Identity; IMEKKO; digital literacy; infrastructure; public service

A. PENDAHULUAN

Transformasi layanan publik berbasis digital telah menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses terhadap data kependudukan. IKD diharapkan mampu menggantikan peran KTP elektronik (e-KTP) dalam bentuk fisik, dan dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat seluler. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik.

Identitas Kependudukan Digital tidak hanya dirancang untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kependudukan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui penerapan IKD, setiap penduduk dapat mengakses data kependudukan secara mandiri, menghindari praktik pemalsuan identitas, serta memudahkan integrasi layanan antarinstansi. Dalam jangka panjang, IKD diharapkan menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, inklusif, dan berbasis data.

Meskipun konsep dan rancangan IKD sudah dirumuskan dengan baik, tantangan nyata muncul pada tahap implementasi, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Salah satu contohnya adalah kawasan IMEKKO (Inanwatan, Metemani, dan Kokoda) di Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah ini merupakan bagian dari daerah yang dikategorikan sebagai 5T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, termiskin, dan terisolir. Sebagai daerah 5T, IMEKKO memiliki infrastruktur dasar

yang belum memadai, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta hambatan komunikasi dan transportasi yang memperlambat proses pembangunan.

Kondisi geografis IMEKKO yang sulit dijangkau, ditambah dengan ketimpangan sosial dan keterbatasan sumber daya manusia, berdampak langsung terhadap implementasi program digital. Program IKD yang mengandalkan perangkat teknologi seperti smartphone, jaringan internet, dan sistem autentikasi digital, membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pemahaman teknologi baik dari masyarakat maupun aparatur pelaksana. Di IMEKKO, hambatan tersebut masih menjadi kenyataan sehari-hari. Banyak warga belum memiliki perangkat digital, jaringan internet belum merata, dan sebagian aparatur belum memiliki keterampilan memadai dalam pengelolaan sistem digital.

Dari hasil observasi awal di lapangan, ditemukan bahwa literasi digital masyarakat di wilayah ini masih sangat rendah. Banyak penduduk yang belum memahami konsep identitas digital, belum pernah mengakses layanan berbasis aplikasi, dan masih bergantung pada pelayanan tatap muka. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait menyebabkan masyarakat tidak menyadari keberadaan dan manfaat IKD. Sementara itu, dari sisi teknis, keterbatasan jaringan internet menjadi hambatan utama, terutama untuk proses aktivasi dan verifikasi data yang memerlukan koneksi stabil.

Kendala lainnya adalah minimnya perangkat pendukung, seperti komputer dan server, yang digunakan oleh aparat kecamatan atau distrik untuk melayani masyarakat. Beberapa petugas bahkan menggunakan perangkat pribadi yang tidak terstandar untuk menjalankan sistem IKD, sehingga berisiko terhadap keamanan data dan menurunkan kualitas pelayanan. Di sisi lain, pelatihan bagi aparatur juga masih terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga kapasitas teknis yang dimiliki tidak memadai untuk mengoperasikan aplikasi maupun menjelaskan prosedur kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada kesiapan daerah, baik dari aspek sosial, infrastruktur, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal seperti IMEKKO. Penelitian ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mempercepat adopsi IKD dan mendorong transformasi digital yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan sosial dan teknis dalam implementasi IKD di wilayah IMEKKO serta memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur administrasi publik, khususnya dalam bidang transformasi digital di daerah tertinggal.

Adapun rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: **"Apa saja hambatan sosial dan teknis yang dihadapi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah IMEKKO, Kabupaten Sorong Selatan?"**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Digital

Literasi digital merupakan salah satu syarat utama dalam adopsi teknologi informasi. Menurut Gilster (1997), literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Di wilayah tertinggal, literasi digital menjadi tantangan besar karena rendahnya akses pendidikan, minimnya pelatihan teknologi, dan terbatasnya sumber daya informasi. Hal ini berpengaruh langsung terhadap sikap masyarakat dalam menerima teknologi baru seperti IKD.

Literasi digital yang rendah akan memengaruhi perceived ease of use dalam model TAM serta effort expectancy dalam model UTAUT. Masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital akan menganggap sistem seperti IKD sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung implementasi IKD.

Infrastruktur Digital di Daerah 5T

Wilayah 5T (tertinggal, terdepan, terluar, termiskin, dan terisolir) umumnya mengalami keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk dalam bidang teknologi informasi. Menurut UNDP (2020), ketimpangan digital di Indonesia masih tinggi, terutama antara wilayah urban dan rural. Keterbatasan jaringan internet, ketersediaan listrik, serta perangkat digital menjadi kendala utama dalam pelaksanaan layanan publik digital seperti IKD. Dalam konteks ini, upaya implementasi IKD di IMEKKO harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sebagai variabel penting.

Ketersediaan infrastruktur digital sangat berkaitan dengan facilitating conditions dalam UTAUT, yang menjelaskan bahwa pengguna akan lebih mungkin mengadopsi teknologi jika mereka memiliki dukungan teknis dan lingkungan yang memadai. Dalam wilayah dengan jaringan terbatas, layanan IKD sulit diakses sehingga efektivitas program pun terganggu.

Teori Adopsi Teknologi: TAM dan UTAUT

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menyatakan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi adalah perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU). PU merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sementara PEOU merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut bebas dari usaha yang berat. Dalam penelitian ini, IKD dapat diterima oleh masyarakat jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) oleh Venkatesh et al. (2003) menyempurnakan TAM dengan menambahkan variabel seperti performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Performance expectancy dan effort expectancy mirip dengan PU dan PEOU dalam TAM, sedangkan social influence mengacu pada pengaruh lingkungan sosial dalam mendorong individu menggunakan teknologi, dan facilitating conditions menunjuk pada dukungan organisasi atau teknis yang memungkinkan penggunaan teknologi secara efektif.

Teori ini sangat penting karena mampu menjelaskan mengapa masyarakat dan aparatur di wilayah 5T, termasuk IMEKKO, mungkin tidak merespons positif terhadap kebijakan IKD. Faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, kemudahan, pengaruh sosial, dan kondisi dukungan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi daerah.

Implementasi Kebijakan Publik Digital

Implementasi kebijakan digital seperti IKD di daerah tertinggal membutuhkan pendekatan adaptif. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks IKD, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui sosialisasi sangat menentukan. Kurangnya komunikasi yang tepat dapat menyebabkan miskonsepsi atau resistensi dari masyarakat terhadap program digital ini.

Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun teknologi, juga menjadi penghambat. Aparatur yang tidak terlatih atau tidak memiliki pemahaman memadai tentang teknologi akan kesulitan dalam melakukan pelayanan berbasis IKD. Di sisi lain, struktur birokrasi yang berbelit juga bisa memperlambat proses transformasi digital.

Model adopsi teknologi (TAM dan UTAUT) sangat relevan dalam mengkaji penerimaan IKD oleh masyarakat dan aparatur. Perceived usefulness dan performance expectancy berkaitan langsung dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD. Jika masyarakat merasa bahwa IKD mempermudah proses administrasi, maka tingkat adopsinya akan meningkat. Effort expectancy dan perceived ease of use berkorelasi dengan tingkat literasi digital masyarakat. Semakin tinggi literasi digital, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi teknologi baru.

Social influence menjelaskan bagaimana peran tokoh masyarakat dan aparatur desa memengaruhi adopsi IKD. Dalam masyarakat yang bersifat komunal seperti di IMEKKO, pengaruh tokoh lokal sangat besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap inovasi teknologi. Sementara facilitating conditions sangat berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan pendukung di tingkat lokal. Tanpa fasilitas dan dukungan dari pemerintah daerah atau pusat, adopsi IKD sulit terlaksana.

Model implementasi kebijakan publik oleh Edward III melengkapi perspektif ini dengan menyoroti pentingnya aspek kelembagaan dan komunikasi dalam proses implementasi. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan IKD.

Penelitian Terkait

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan implementasi digitalisasi administrasi di daerah tertinggal. Misalnya, studi UNDP (2020) menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam penerapan layanan digital di wilayah marginal, dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Sementara itu, penelitian oleh Kominfo (2023) menyatakan bahwa kesenjangan digital di Indonesia masih tinggi dan diperlukan strategi khusus untuk wilayah 3T dan 5T. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi implementasi IKD yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Dengan mengacu pada berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial, edukasi, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada masyarakat di wilayah tertinggal, seperti daerah IMEKKO.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada integrasi antara teori adopsi teknologi dan teori implementasi kebijakan publik. Hambatan sosial seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi dipahami melalui kacamata effort expectancy dan social influence, sementara hambatan teknis seperti terbatasnya jaringan dan perangkat dianalisis melalui facilitating conditions. Pendekatan Edward III menambah dimensi kelembagaan yang membantu menjelaskan keterkaitan antara pelaksana kebijakan, struktur organisasi, dan keberhasilan implementasi.

Dengan mengintegrasikan teori adopsi teknologi dan literatur tentang wilayah tertinggal serta implementasi kebijakan publik, penelitian ini memiliki kerangka yang kuat untuk menganalisis hambatan sosial dan teknis dalam implementasi IKD di wilayah IMEKKO.

Kebaruan dan Kesenjangan Penelitian (Novelty and Research Gap)

Penelitian tentang penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah banyak dilakukan di daerah perkotaan yang memiliki infrastruktur memadai dan literasi digital yang relatif tinggi. Namun, studi mengenai implementasi IKD di wilayah 5T, khususnya di kawasan IMEKKO, Kabupaten Sorong Selatan, masih sangat terbatas. Gap ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam tentang tantangan implementasi kebijakan digital di daerah dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi dua pendekatan teoritis, yaitu model adopsi teknologi (TAM dan UTAUT) dan teori implementasi kebijakan publik (Edward III), dalam konteks daerah tertinggal. Pendekatan ini

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hambatan sosial dan teknis yang dihadapi, sekaligus menawarkan solusi kontekstual yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap literatur administrasi publik digital di wilayah timur Indonesia yang selama ini masih kurang terwakili dalam kajian akademik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hambatan sosial dan teknis dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah 5T, khususnya pada kawasan IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kokoda, dan sekitarnya) yang merupakan bagian dari Kabupaten Sorong Selatan. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena mampu mengungkap fenomena secara kontekstual, alami, dan menyeluruh dari perspektif para pelaku di lapangan.

Informan dan Teknik Sampling

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung, pengetahuan, atau posisi strategis yang relevan terhadap proses implementasi IKD. Informan terdiri dari:

- **Aparatur Disdukcapil Kabupaten Sorong Selatan (4 orang)**: Mereka terlibat langsung dalam penyusunan program IKD, pendistribusian alat, dan pelayanan kepada masyarakat.
- **Aparatur distrik/kampung (3 orang)**: Perangkat kampung dan distrik di wilayah IMEKKO yang menjadi penghubung utama antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal.
- **Warga masyarakat (3 orang)**: Penduduk setempat yang telah mencoba atau terlibat dalam proses pendaftaran IKD.
- **Tokoh masyarakat/lokal (2 orang)**: Pemuka agama, tokoh adat, atau kepala suku yang memiliki pengaruh sosial dan kultural dalam proses penerimaan program pemerintah. Kriteria pemilihan informan memperhatikan keterwakilan administratif dan sosial, guna memperoleh perspektif yang luas dari berbagai lapisan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: **Wawancara mendalam (in-depth interview)**: Dilakukan secara langsung kepada masing-masing informan dengan panduan semi-terstruktur. **Observasi partisipatif**: Pengamatan langsung terhadap kondisi pelayanan IKD, interaksi petugas dengan masyarakat, dan situasi geografis yang mempengaruhi akses teknologi. **Dokumentasi**: Pengumpulan data sekunder berupa laporan internal Disdukcapil, berita media lokal, dan data demografis wilayah IMEKKO.

Contoh pertanyaan yang diajukan dalam wawancara antara lain: "Apa yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program IKD di sini?" "Sejauh mana masyarakat memahami pentingnya IKD?" "Bagaimana sikap dan kesiapan aparat kampung dalam menyampaikan informasi terkait IKD?" "Apakah infrastruktur di tempat Bapak/Ibu mendukung penggunaan sistem digital ini?"

Tema yang digali mencakup persepsi terhadap manfaat teknologi, akses dan kesiapan infrastruktur, peran kepemimpinan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam transformasi digital.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan: **Reduksi Data**: Proses seleksi, pemusatan perhatian, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur berdasarkan kategori tertentu seperti hambatan sosial, teknis, dan kelembagaan. **Penyajian Data**: Menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk memudahkan pemahaman pola dan keterkaitan antar faktor. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**: Merumuskan makna dari data yang telah dianalisis dan memverifikasi kebenaran serta konsistensinya dengan cara triangulasi.

Validitas Data Validitas dan keabsahan data dijaga melalui: **Triangulasi sumber**: Membandingkan data yang diperoleh dari aparatur, masyarakat, dan tokoh adat. **Triangulasi metode**: Menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Member checking**: Konfirmasi hasil wawancara kepada informan agar memastikan keakuratan penafsiran.

Matriks Lokasi-Informan-Temuan

Lokasi	Informan	Temuan Utama
Kokoda	Aparatur kampung, warga	Keterbatasan sinyal, rendahnya pemahaman digital, kurangnya fasilitas
Metemani	Staf Disdukcapil, tokoh masyarakat	Sosialisasi belum menjangkau kampung terpencil, resistensi dari warga
Inanwatan	Aparatur distrik, warga	Tidak ada pelatihan perangkat, keterbatasan jaringan dan listrik
Teminabuan (pusat)	Staf Disdukcapil kabupaten	Koordinasi antarpelaksana lambat, pelatihan belum menyentuh IMEKKO

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika, yaitu informed consent, anonimitas, dan penghargaan terhadap hak partisipan. Setiap informan diminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan, dan identitas mereka dijaga kerahasiaannya demi keamanan dan kenyamanan.

Dengan metode ini, peneliti berharap dapat menggambarkan secara holistik realitas di lapangan tentang pelaksanaan IKD dalam konteks tantangan wilayah tertinggal seperti IMEKKO serta mengungkapkan strategi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan berbagai hambatan sosial dan teknis yang memengaruhi proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah IMEKKO, Kabupaten Sorong Selatan. Hambatan-hambatan tersebut dianalisis berdasarkan teori adopsi teknologi (TAM dan UTAUT) serta teori implementasi kebijakan publik. Temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari masyarakat, tokoh adat, dan aparatur pelaksana, serta observasi langsung di lapangan.

1. Hambatan Sosial

Salah satu hambatan utama dalam implementasi IKD adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Sebagian besar warga di IMEKKO belum terbiasa menggunakan perangkat digital, termasuk smartphone dan aplikasi layanan daring. Salah satu warga di Distrik Inanwatan menyatakan, "Beta tidak tahu cara pakai HP android, apalagi scan barcode untuk dapat identitas digital." Pernyataan ini memperkuat bahwa perceived ease of use (PEOU) dari model TAM sangat rendah di kalangan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum siap secara kognitif dan teknologis untuk menerima inovasi digital.

Selain itu, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang belum memahami manfaat dari IKD. Beberapa warga menganggap bahwa KTP digital tidak lebih penting dari KTP fisik. Seorang tokoh masyarakat di Metemani menyebutkan, "Masyarakat pikir kalau sudah punya KTP biasa, kenapa harus ganti-ganti lagi." Hal ini memperkuat pentingnya social influence dalam model UTAUT, karena tokoh lokal memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Kurangnya edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat menyebabkan penyebaran informasi tidak merata dan menciptakan keraguan. Ketidakpercayaan terhadap kebijakan digital juga dipengaruhi oleh pengalaman buruk terhadap program pemerintah sebelumnya. Salah satu tokoh adat menyampaikan, "Dulu ada juga program e-KTP yang kita susah dapat, sekarang datang yang baru, takut kita hanya buang waktu." Sikap ini merupakan bentuk skeptisisme kebijakan yang berkaitan dengan variabel disposisi pelaksana dalam teori implementasi Edward III.

2. Hambatan Teknis

Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan serius. Di banyak titik layanan, jaringan internet tidak tersedia secara stabil. Salah satu aparatur kampung di Kokoda menyatakan, "Kalau mau buka jaringan saja susah, bagaimana bisa download aplikasi IKD." Keterbatasan listrik juga menjadi kendala tambahan, terutama bagi

masyarakat yang tidak memiliki akses daya 24 jam. Situasi ini membuat proses pendaftaran dan aktivasi IKD menjadi tidak efisien dan membebani petugas.

Masalah perangkat keras juga menjadi penghalang. Banyak aparat kampung tidak memiliki laptop atau tablet yang kompatibel untuk menjalankan sistem IKD. Bahkan, di beberapa lokasi, petugas masih menggunakan perangkat pribadi yang tidak memadai. Hal ini menggambarkan lemahnya facilitating conditions dalam model UTAUT, di mana dukungan teknis dan sumber daya sangat menentukan kesuksesan adopsi teknologi.

Keterbatasan sumber daya manusia juga muncul dari pihak pelaksana. Beberapa aparat kampung dan petugas Disdukcapil belum sepenuhnya menguasai penggunaan perangkat dan aplikasi IKD. Salah satu staf Disdukcapil mengakui, "Kami sendiri masih belajar, jadi waktu mau ajar masyarakat juga kita masih bingung." Pernyataan ini menegaskan bahwa kesiapan internal lembaga belum optimal untuk menjalankan transformasi digital.

3. **Pembahasan dan Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Lain**

Temuan penelitian ini sejalan dengan Davis (1989) dalam TAM yang menyatakan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use adalah determinan utama dalam penerimaan teknologi. Dalam konteks IMEKKO, rendahnya persepsi terhadap kegunaan IKD dan kesulitan penggunaan sistem secara langsung menurunkan adopsi teknologi oleh masyarakat. Artinya, faktor persepsi sangat memengaruhi keberhasilan adopsi teknologi di wilayah marginal.

Selain itu, teori UTAUT oleh Venkatesh et al. (2003) sangat relevan, terutama variabel social influence dan facilitating conditions. Kuatnya pengaruh tokoh lokal dan ketergantungan terhadap fasilitas teknis menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi. Jika tokoh masyarakat tidak mendukung atau tidak dilibatkan secara aktif, maka sosialisasi cenderung gagal menjangkau komunitas akar rumput.

Hasil ini juga selaras dengan penelitian oleh Purwanto & Wahyudi (2021) yang meneliti implementasi IKD di daerah pedalaman Kalimantan. Mereka menyimpulkan bahwa kegagalan penerapan IKD lebih banyak disebabkan oleh ketidaksiapan sosial dan lemahnya infrastruktur, bukan karena penolakan ideologis. Artinya, persoalan implementasi lebih bersifat struktural daripada kultural.

Namun, penelitian ini menawarkan keunikan pada konteks wilayah IMEKKO sebagai daerah 5T yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan kultural yang lebih kompleks. Ketimpangan digital (digital divide) di wilayah ini tidak hanya terjadi antara desa dan kota, tetapi juga antar kampung dalam satu distrik. Ini membuat strategi implementasi IKD harus sangat spesifik dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, hambatan yang ditemukan berakar pada lemahnya komunikasi kebijakan, kekurangan sumber daya, dan belum terbentuknya disposisi positif dari pelaksana dan penerima kebijakan. Sosialisasi

yang tidak menyeluruh, distribusi peralatan yang tidak merata, dan pelatihan yang terbatas menyebabkan kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga kesiapan sosial, budaya, dan kelembagaan. Diperlukan strategi penyuluhan berbasis kearifan lokal, pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur digital yang merata untuk memastikan adopsi IKD secara efektif di wilayah 5T seperti IMEKKO. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang digunakan dalam implementasi teknologi publik di wilayah tertinggal harus inklusif, partisipatif, dan kontekstual.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah IMEKKO Kabupaten Sorong Selatan masih menghadapi berbagai hambatan signifikan, baik dari aspek sosial maupun teknis. Hambatan sosial meliputi rendahnya literasi digital, resistensi budaya, dan kurangnya pemahaman atas urgensi IKD. Sementara hambatan teknis mencakup keterbatasan infrastruktur jaringan, ketiadaan perangkat yang memadai, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan dua model teori utama—TAM dan UTAUT—dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan publik berbasis teknologi di daerah tertinggal. Studi ini juga memperluas aplikasi teori implementasi kebijakan Edward III ke dalam konteks digitalisasi administrasi kependudukan, yang selama ini masih jarang dibahas dalam literatur lokal.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada akses geografis yang terbatas akibat kondisi infrastruktur wilayah IMEKKO serta jumlah informan yang masih relatif kecil karena faktor keterjangkauan dan keterbatasan waktu lapangan. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini perlu dilakukan dengan hati-hati.

Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan agar studi serupa dilakukan pada wilayah 5T lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Studi kuantitatif juga dapat dikembangkan untuk mengukur tingkat literasi digital atau kesiapan teknologi secara lebih luas. Selain itu, pendekatan partisipatif berbasis komunitas adat juga bisa dieksplorasi sebagai model penyuluhan dalam program digitalisasi kependudukan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis implementasi Identitas Kependudukan Digital*. Direktorat Jenderal Dukcapil.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Purwanto, A., & Wahyudi, M. (2021). Tantangan implementasi identitas kependudukan digital di daerah pedalaman: Studi kasus Kalimantan Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(2), 112–125. https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.4567

UNDP Indonesia. (2020). *Laporan ketimpangan akses digital di Indonesia*. United Nations Development Programme (UNDP).

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540